

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat diselesaikan. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dengan baik. Shalawat beriringkan salam tak lupa kami ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Penyusunan LKJIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang mulai dari Unit/ Instansi yang ada dalam Pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu segala kritik serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padang, 30 Januari 2025
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Padang Pariaman



ERMAN, S. Sos. MM
NIP. 19651125 198602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan Pemerintah yang berkinerja maka disusunlah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

A. GAMBARAN UMUM DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa otonomi diletakkan pada Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam Undang-undang tersebut juga diberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah diarahkan agar Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terlihat adanya peningkatan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dengan memperhatikan kehendak, keinginan serta aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan tuntutan reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN. Selanjutnya dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 1999 dan UU No. 31 Tahun 1999.

Untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menciptakan pemerintah yang akuntabel, bertanggung jawab dengan ukuran dan indikator kinerja yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah telah menyusun Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Tahun 2021-2026. Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut merupakan pedoman atau penunjuk arah bagi seluruh unit kerja, dinas dan perangkat Pemerintah Daerah serta seluruh unsur masyarakat dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman dan dasar dari pembuatan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib bukan pelayanan dasar. Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu Pemerintahan Daerah di Indonesia telah melaksanakan Urusan Wajib Bidang Perpustakaan dan Kearsipan ini sejak Tahun 2009. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan salah satu SKPD di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang

Pariaman No. 10 Tahun 2016 Tanggal tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2016 tentang rincian uraian tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok :

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman dibidang perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pelaksanaan tugas dasar untuk dapat terealisasi dalam kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Serta fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun Kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan dengan kewenangan yang dimilikinya.
2. Memberikan Izin dan Pelaksanaan pelayanan dibidang perpustakaan dan kearsipan.
3. Memberikan Bimbingan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan
4. Melakukan penyuluhan tentang perpustakaan dan kearsipan yang erat kaitannya dalam upaya pengembangan perpustakaan dan kearsipan yang optimal.
5. Melakukan tata usaha kantor

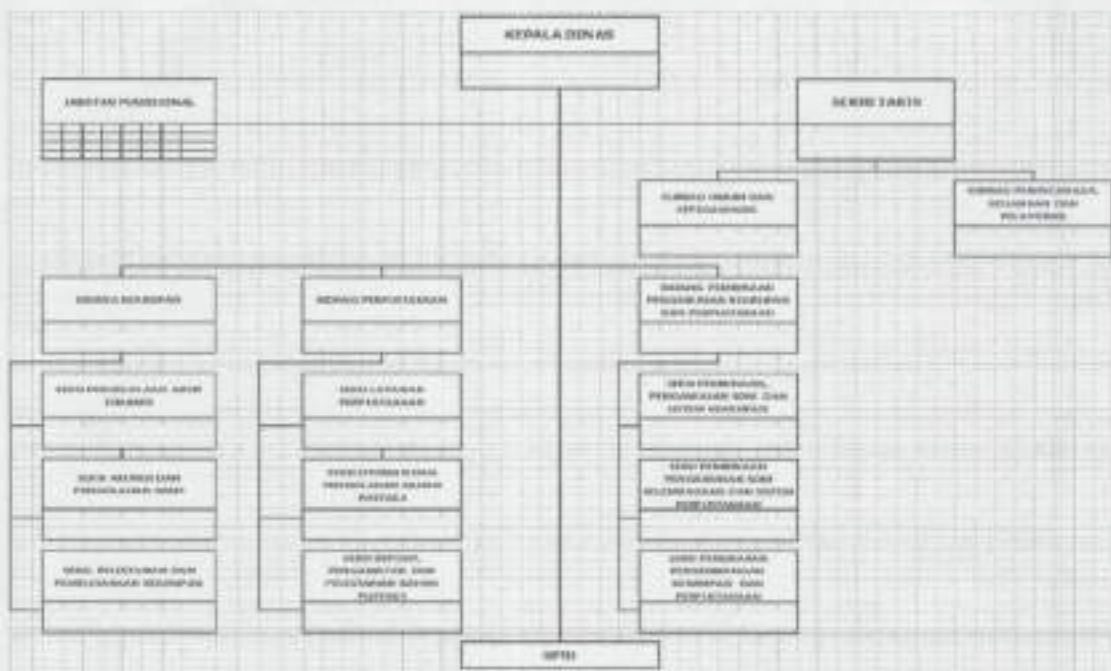
Dalam struktur organisasi yang ada, pelaksanaan tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilakukan oleh seksi-seksi yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 yaitu :

Kepala Dinas, mempunyai tugas :

1. Memimpin dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Membina penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan daerah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/ kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dan masyarakat;

4. Melakukan pengawasan kearsipan dan Perpustakaan daerah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/ kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
5. Menyelenggarakan pengelolaan arsip dinamis;
6. Menyelenggarakan pengelolaan arsip statis;
7. Menyelenggarakan pelayanan, dan pemanfaatan arsip;
8. Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan ;
9. Menyelenggarakan pelayanan dan pemanfaatan perpustakaan;
10. Menyelenggarakan perencanaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI



1.2 SUMBER DAYA MANUSIA

1.2.1 NAMA PEJABAT BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI

Jumlah Pegawai yang ada pada SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 31 Desember 2024 adalah 32 orang, yang terdiri dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang tenaga PPPK dan 7 orang tenaga Non ASN. Dimana Gol. II 9 orang, Gol. III 9 orang dan Gol. IV 6 orang, dengan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

kualifikasi pendidikan S2 6 orang, sarjana 8 orang dan 9 orang sarjana muda dan SMA 2 orang. Jumlah pegawai yang ada saat ini masih kurang dengan kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja komposisi ASN pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Peta Jabatan yang telah disusun, ditambah terdapat 3 ASN yang pensiun di Tahun 2024 dan salah satunya menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV yang mengakibatkan kekosongan jabatan sampai akhir tahun 2024.

Pada tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendapatkan tambahan personil dari Pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) dan untuk menutupi kekurangan personil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dibantu oleh 7 orang tenaga swakelola yang terdiri dari 2 orang tenaga administrasi, 1 orang tenaga layanan perpustakaan, 2 orang sopir perpustakaan keliling, 1 orang tenaga kebersihan dan 1 orang sopir kepala dinas.

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman adalah :

KOMPOSISI PNS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. PADANG PARIAMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2024

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	6
2	GOLONGAN III	9
3	GOLONGAN II	9
	J U M L A H	24

Sumber : DUK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024

KOMPOSISI PNS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. PADANG PARIAMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH MENURUT KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Strata 2	3	3	6
2	Strata 1	2	5	7
3	D.IV	-	-	-
4	D.III	1	8	9

5	SLTA	2	-	2
6	J U M L A H	8	16	24

Sumber : DUK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024

1.2.2 JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 24 personil dengan tingkat pendidikan :

S2 : 6 Orang

S1 : 7 Orang

DIII : 9 Orang

DII : - Orang

SMA : 2 Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Pangkat dan Golongan sebagai berikut :

Golongan IV : 6 Orang

Golongan III : 9 Orang

Golongan II : 9 Orang

Golongan I : 0

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Permasalahan di Bidang Kearsipan

NO	PERMASALAHAN	DATA PENDUKUNG	PENYEBAB
1	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kearsipan seperti belum adanya depo arsip yang sesuai dengan standar tata kelola kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan beralamatkan di Jln. A. Yani No 21 Pariaman Tengah Ex. Dinas	Belum adanya Depo Arsip yang memadai dan kendaraan operasional

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	yang baku serta belum memiliki kendaraan operasional khusus untuk pengelolaan dan penataan arsip ke SKPD, Kecamatan dan Nagari	Pendidikan	kearsipan
2	Kurangnya Tenaga Fungsional Arsiparis baik di LKPD maupun di OPD dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	ANJAB ABK untuk Jabatan Fungsional Arsiparis	Belum terpenuhinya kebutuhan ASN berdasarkan ANJAB ABK yang telah disusun
3	Belum Seimbangnya antara volume arsip di Kab. Padang Pariaman dengan sarana penyimpan kearsipan di LKD maupun SKPD.	Masing-masing SKPD dan LKD	Jumlah Arsip yang harus di kelola, di tata dan di simpan tidak sebanding dengan sarana penyimpanan yang ada pada setiap SKPD maupun LKD.
4	Kurang seriusnya perhatian pimpinan SKPD, Kecamatan dan Nagari terhadap pendataan, penataan arsip serta masih sedikitnya penyerahan arsip statis ke LKD.	Adanya peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengelolaan kearsipan	Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kearsipan belum disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda)
5	Masih rendahnya pengetahuan tenaga fungsional arsiparis di LKD dan tenaga pengelola kearsipan di OPD.	Fungsional Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan ada tapi masih minim pendidikan dan pelatihan	Kurangnya dana APBD untuk pendidikan dan Pelatihan SDM kearsipan

6	Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kearsipan	Tahun 2024 anggaran untuk Urusan Kearsipan hanya Rp20.999.100,- Karena adanya pemotongan anggaran yang bersumber dari DAU murni pada anggaran perubahan tahun 2024	Adanya kebijakan DAU peruntukkan yang menyebabkan urusan Kearsipan tidak lagi menjadi mendapatkan porsi anggaran yang ideal
---	---	---	---

2. Permasalahan di Bidang Perpustakaan

NO	PERMASALAHAN	DATA PENDUKUNG	PENYEBAB
1	Masih rendahnya kepedulian stakeholder terhadap pengelolaan perpustakaan di wilayahnya baik itu Perpustakaan Sekolah, Nagari, TBM dan Perguruan Tinggi	Masih banyak perpustakaan Nagari, sekolah dan taman baca masyarakat yang belum memenuhi standar Nasional Perpustakaan	Keterbatasan anggaran dan kepedulian stakeholder terkait
2	Belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah dan pusat keramaian.	2 unit mobil Perpustakaan Keliling	Luasnya jangkauan wilayah Kabupaten Padang Pariaman dengan keterbatasan personil yang ada pada Perpustakaan Daerah menyebabkan pelaksanaan operasional perpustakaan

			keliling belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Padang Pariaman
3	Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia tenaga Pustakawan dan pengelola perpustakaan	Kualitas layanan perpustakaan kepada pemustaka belum sesuai dengan standar pelayanan maksimal	Belum adanya reward dan punishment kepada tenaga Pustakawan dan Pengelolaan Perpustakaan
4	Belum optimalnya pembinaan perpustakaan ke Nagari, Sekolah dan Taman Baca Masyarakat.	Belum adanya pemerataan layanan perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan gambaran umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman serta menguraikan permasalahan utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 melalui Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021 s.d 2026.

Untuk mencapai kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyusun Perencanaan Kinerja tahun 2024 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024. Target-target kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yaitu: *"Padang Pariaman Berjaya."*

2. Misi

Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Misi 4 dan Misi 5 Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Misi 4 yang akan diwujudkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.** Misi ini mempunyai tujuan membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Misi 5 yang akan diwujudkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.** Misi ini mempunyai tujuan terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada RPJMD 2021 s.d 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Listerasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya pengelolaan Kearsipan sesuai standar kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)
	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi KEMENPAN RB	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka ditetapkan Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 termasuk untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan didukung oleh 3 Sasaran Strategis dengan 4 indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024

Tabel 2.2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	100
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	67,50
2	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standart Kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	68
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	76 (BB)

A. Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama Tahun 2024. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat/Kategori
>100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤100	Berhasil
80 < s.d ≤90	Cukup Berhasil
70 < s.d ≤80	Kurang Berhasil
≤70	Tidak Berhasil

A. Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Target dan Capaian kinerja sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 s/d 2026

N	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024							
			Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
01	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	90,20	91,93	101,92	90,25	97,27	107,78	90,30	100	110,74	100	97,8	97,8					
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	15	10	66,66	30	28	93,33	35	66,88	191,08	67,50	69,59	103,09	70	72			
02	Meningkatnya pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	73,48	67,76	92,22	60,80	60,01	96,70	63,95	67,05	104,85	68	70,11	103,10	75	78			
03	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	B	AA	128,57	B	A	117,14	B	88	113,27	76 (BB)	75,50 (BB)	99,34	78 (BB)	80 (A)			

Paraf Verifikasi

16

REVISI BERULANG

Kerus Tior

Datus

Wenjah

Tanggal Paraf

Tanggal Paraf

Tanggal Paraf

Tanggal Paraf

Tanggal Paraf

Tanggal Paraf

Ka. Bapetbangda

Inspektur

Kاتب Organisasi

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 :



Sasaran 1:

Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan

Untuk meningkatkan layanan perpustakaan agar terciptanya kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan dan meningkatnya minat baca masyarakat maka perpustakaan umum daerah perlu memiliki gedung dan bangunan yang mewah dan megah dengan sejumlah ruangan yang memadai, SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, sumber informasi (koleksi) bahan pustaka yang lengkap, bervariasi, bermutu dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*up to date*) serta tersedia dan dilengkapi penerapan teknologi informasi.

Dalam rangka mencapai indikator-indikator di atas agar terwujudnya sasaran strategis Meningkatkan Layanan Perpustakaan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman melakukan upaya dengan pelaksanaan program Pembinaan Perpustakaan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan



Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan perpustakaan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Menurut Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004 tentang indeks kepuasan masyarakat, ada 14 (empat belas) hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan, antara lain prosedur pelayanan, kesesuaian persyaratan, keberadaan/kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan pelayanan, kesopanan petugas, kewajaran biaya, kepastian biaya, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

Jadi dengan adanya indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat mengukur

kinerja layanan perpustakaan setiap tahunnya. Untuk itu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan menjadi sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman.

Indeks kepuasan masyarakat layanan perpustakaan pada tahun 2024 realisasinya sebesar 97,8% dengan persentase capaian 97,8% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Terjadi penurunan capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Adanya berbagai faktor yang menyebabkan penurunan kinerja pada indikator ini adalah pengurangan anggaran urusan perpustakaan dan keterbatasan SDM untuk melakukan pelayanan perpustakaan kepada pengunjung perpustakaan.

Walaupun indikator ini tidak memenuhi target yang ditetapkan namun capaian 97,8% dikategorikan dengan interpretasi Berhasil. Karena capaian kinerja sudah berada di angka 97,8%. Meski adanya pengurangan anggaran urusan perpustakaan pada tahun 2024 namun komitmen kerja dari pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan khususnya bidang perpustakaan dalam hal meningkatkan kepuasan layanan Perpustakaan tetap tinggi sehingga interpretasi Berhasil dapat dicapai pada tahun 2024.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh program Pembinaan Perpustakaan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengembangan Bahan Pustaka, pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestrasikan dan didayagunakan dimana secara umum output dari masing-masing sub kegiatan tersebut adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Umum Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan di lingkungan Kab. Padang Pariaman.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024:

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	Persentase	100	97,8	97,8	Berhasil	

Pada tabel di atas, dapat tergambar realisasi capaian kinerja indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat layanan kepustakaan sebesar 97,8% dari target 100% dengan persentase capaian 97,8% interpretasi berhasil. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan tersebut di ukur dengan menggunakan aplikasi layanan perpustakaan (inslislite) dengan responden pengunjung perpustakaan daerah selama tahun 2024.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024		%	Interpretasi	Ket
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	Persentase	100	100	97,8	97,8	Berhasil	

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan mengalami penurunan dari tahun 2023. Realisasi tahun 2023 sebesar 100%, turun pada tahun 2024 menjadi 97,8% namun masih dalam kategori interpretasi Berhasil. Penurunan realisasi kinerja dipengaruhi berbagai faktor antara lain ; keterbatasan anggaran untuk pelayanan perpustakaan, kekurangan SDM layanan perpustakaan dan masih terbatasnya sarana prasarana layanan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung atau pemustaka yang datang ke Perpustakaan. Sedangkan ditahun 2023 dukungan anggaran untuk layanan perpustakaan sangat tinggi dibanding tahun 2024. Adanya berbagai

koleksi terbaru dan pengadaan pengadaan untuk pemustaka membuat realisasi kinerja pada tahun 2023 sangat baik.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:



Jika dilihat dari Rencana Strategis 5 tahunan terjadi penurunan kinerja pada indikator ini di tahun 2024. Sedangkan tahun 2021 sampai 2023 kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan realisasinya selalu mengalami kenaikan.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.1 Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian Target

Penyebab gagalnya tercapai target pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran untuk menunjang indikator Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan;
2. Keterbatasan SDM dalam hal pelayanan kepada pengunjung Perpustakaan;
3. Belum adanya komitmen yang kuat dari pejabat hingga staf perpustakaan dalam hal melakukan peningkatan layanan kepada pengunjung perpustakaan.

5. Beberapa Upaya Perbaikan Pencapaian Target Kinerja

Berikut beberapa upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Mencari sumber-sumber dana lain yang dapat menunjang indeks kepuasan masyarakat layanan kepustakaan;
2. Melakukan pengusulan kebutuhan ASN melalui ANJAB ABK;

3. Melakukan rapat evaluasi internal terkait kinerja pelayanan perpustakaan.

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	97,8%	88,93%	8,87%

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar 8,87%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan dapat interpestasikan sudah efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan adalah sebesar Rp700.548.670. dengan persentase 88,93%. Dalam mencapai target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan tahun 2024 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.787.740.000,- dengan 2 program 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

6. Berikut capaian program/ kegiatan Sasaran 4 dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan adalah sebagai berikut:

No	Program /Kegiatan	Capaian Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi	Capaian
	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan			
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Output : Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000	15 Layanan	100 Layanan	666,66

2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah perpustakaan daerah yang melaksanakan pengembangan dan layanan operasional perpustakaan dan perpustakaan keliling	1 Pustaka Daerah/ 50 Lokasi	1 Pustaka Daerah/ 50 Lokasi	100
3	Pengembangan Bahan Pustaka	Output : Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	500 Eks	500 Eks	100
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Output : Jumlah Koleksi yang terpelihara	2000 Eks	2000 Eks	100
5	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Output : Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan pelatihan dan keterampilan inklusi sosial	25 Perpustakaan	76 Perpustakaan	304
6	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Output : Jumlah Naskah Kuno yang Terkumpul, Diolah dan Dialihmediakan	10 Eksemplar	10 Eksemplar	100

7. Dokumentasi Kegiatan



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

Membaca pada dasarnya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Membaca sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dari kehidupan sehari-hari. Kegiatan membaca harus ditumbuhkembangkan sejak usia dini dalam lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dalam konteks ini, peningkatan minat baca masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu. Metode pengukuran nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat menggunakan kajian tingkat kegemaran membaca dengan aspek durasi membaca, Frekuensi membaca, jumlah buku yang dibaca, durasi akses internet, serta frekuensi akses internet dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2024 dilakukan menggunakan pendekatan untuk tingkat kegemaran membaca masyarakat menggunakan metode statistik deskriptif kuantitatif, yakni data yang dikumpulkan diperoleh dari sampel populasi kajian menggunakan kuisioner dan dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Pengukuran ini dilakukan secara bersama-sama dengan 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat yang dikomandoi oleh Provinsi Sumatera Barat.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	67,50	69,59	103,09	Sangat Berhasil	
--	--	---------------------------------	-------	-------	-------	--------	-----------------	--

Pada tabel di atas, dapat terlihat nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat tahun 2024 adalah 69,59 dengan target 67,50 dengan interpretasi sangat berhasil. Capaian realisasi kinerja disebabkan adanya dukungan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan untuk meningkatkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca. Kegiatan-kegiatan berbentuk lomba-lomba tingkat SD/MI, SMP se Kab. Padang Pariaman di Perpustakaan Umum Daerah serta adanya kegiatan kegiatan sosialisasi perpustakaan dan kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial pada tahun 2024 secara langsung mempengaruhi Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024		%	Interpretasi	Ket
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	66,88	67,50	69,59	103,09	Sangat Berhasil	

Pada tabel diatas dapat terlihat peningkatan realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024. Tahun 2023 nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah 66,88 sedangkan tahun 2024 naik menjadi 69,59 dengan kategori Sedang dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukan kinerja yang positif pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat di Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Peningkatan kinerja tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : adanya dukung anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan peningkatan

kegemaran membaca, terlaksananya kegiatan-kegiatan lomba - lomba, sosialisasi perpustakaan dan kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial menyebabkan terjadi peningkatan nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Tahun 2024.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:



Dilihat dari Grafik di atas Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini menggambarkan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan semakin jelas dan nyata dalam meningkatkan Kegemaran Membaca masyarakat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

4. Membandingkan realisasi kinerja nilai TGM Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Nasional Tahun 2024	Realisasi Provinsi Tahun 2024	Realisasi Kabupaten Tahun 2024
1	2	3	4	5	9	10
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	72,44	70,51	69,59

Pada tabel diatas dapat tergambarkan nilai Tingkat Kegemaran Membaca untuk Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten tahun 2024. Nilai Tingkat

Kegemaran Membaca Masyarakat tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berada sedikit di bawah nilai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

5.1 Analisa Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target

Penyebab berhasilnya pencapaian target pada indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Terlaksananya berbagai program pembinaan perpustakaan kegiatan pengelolaan perpustakaan Tk daerah Kab/ Kota, dan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca TK. Daerah Kab/ Kota tahun 2024;
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam peningkatan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca;
3. Adanya kolaborasi dari beberapa stakeholder untuk meningkatkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca.

5.2 Analisa Penyebab Faktor Penghambat Indikator Kinerja

Beberapa faktor penghambat pencapaian indikator kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca antara lain :

1. Luasnya wilayah Kabupaten Padang Pariaman mengakibatkan masih banyaknya daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh oleh perpustakaan;
2. Masih rendahnya minat baca dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca;
3. Masih kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan anggaran urusan perpustakaan untuk mendukung peningkatan minat baca masyarakat.

6. Upaya Peningkatan Pencapaian Target Kinerja

Berikut beberapa upaya dalam meningkatkan pencapaian target kinerja :

1. Melakukan kegiatan- kegiatan pelibatan masyarakat ke Perpustakaan;
2. Meningkatkan promosi, sosialisasi dan perpustakaan digital untuk memudahkan masyarakat mengakses bahan bacaan;
3. Mengajukan proposal bantuan-bantuan untuk perpustakaan Nagari, sekolah dan TBM ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

7. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	69,59%	90,05%	(-20,46)%

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar -20,46%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, untuk indikator kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dapat interpestasikan belum efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Nilai Tingkat Kegemaran Membaca adalah sebesar Rp900.463.309. dengan persentase 90,05%. Dalam mencapai target indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca tahun 2024 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan 2 program 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan.

8. Berikut capaian program/ kegiatan Sasaran 1 dengan indikator 2 Nilai Tngkat Kegemaran Membaca adalah sebagai berikut:

No	Program /Kegiatan	Capaian Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi	Capaian
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Output : Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000	15 Layanan	100 Layanan	666
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah perpustakaan daerah yang melaksanakan pengembangan dan	1 Pustaka Daerah/ 50 Lokasi	1 Pustaka Daerah/ 50 Lokasi	100

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

		layanan operasional perpustakaan dan perpustakaan keliling			
3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Output : Jumlah perpustakaan nagari/sekolah yang dibina, dievaluasi dan dinilai	34 Perpustakaan	34 Perpustakaan	100
4	Pengembangan Bahan Perpustakaan	Output : Jumlah Bahan Perpustakaan tercetak dan diadakan	500 Eks	500 Eks	100
5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Output : Jumlah Koleksi yang terpelihara	2000 Eks	2000 Eks	100
6	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Output : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	1 Lokus	100
7	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	18 Orang	150
8	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Output : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	25 Perpustakaan	76 Perpustakaan	304
9	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya	1 Orang	1 Orang	100

10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat			
1	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Output : Jumlah peserta sosialisasi tata cara penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	10 Eks	10 Eks	100

5. Dokumentasi Kegiatan





**Sasaran 2:***Meningkatnya pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan*

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2024. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip
 - a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota
 - ✓ Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis;
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun
 - ✓ Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun
 - b. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - ✓ Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Renstra 2021 .sd 2026

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024		
		Target	Realisasi	%
1	Indeks Kearsipan (ANRI)	68	70,11	103,10

Indeks Kearsipan (ANRI)

Nilai indeks pengelola arsip eksternal (LAKE) merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola kearsipan secara nasional. Kegiatan ini mulai dilaksanakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2017 sampai pada saat sekarang ini. ANRI melakukan penyusunan Laporan Hasil

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) berdasarkan LAKE dan LAKI paling lambat pada 30 november setiap tahun anggaran.

Adapun bentuk instrument audit kearsipan antara lain ; formulir audit kearsipan, wawancara dan verifikasi lapangan. Tim pengawas kearsipan memberikan nilai atas hasil pengawasan kearsipan yang dituangkan dalam LAKE dan LAKI dengan predikat nilai buruk, kurang, cukup, baik, sangat baik. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar melakukan penilaian kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/ Kota di lingkungan Prov. Sumbar. LKD Prov. Sumbar akan langsung di nilai oleh Arsip Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya.

Nilai LAKE ini merupakan salah satu indikator Reformasi Birokrasi dari Kemenpan-RB Republik Indonesia. Agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan penghargaan Reformasi Birokrasi tentunya nilai LAKE Kabupaten Padang Pariaman harus mendapatkan predikat sangat baik dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	Nilai	68	70,11	103,10	Sangat Berhasil	

Untuk Indeks Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendapatkan nilai 70,11 melebihi target yang ditetapkan sebesar 68 dengan interpretasi Sangat Berhasil dan persentase persentase capaian 103,10%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024		%	Interpretasi	Ket
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	Nilai	67,05	68	70,11	103,10	Sangat Berhasil	

Realisasi nilai LAKE Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024 berhasil mencapai target dan naik dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar 2,96 dengan predikat nilai BB "Sangat Baik" dan interpretasi Sangat Berhasil. Pada tahun 2023 realisasi Indeks Kearsipan (ANRI) 67,05, tahun 2024 naik menjadi 70,11. Kenaikan realisasi tahun 2024 ini disebabkan oleh adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk meningkatkan Indeks Kearsipan (ANRI) di Kabupaten Padang Pariaman. Adanya komitmen dari seluruh OPD di lingkungan Kab. Padang Pariaman untuk menata pengelolaan arsip nya menjadi salah satu faktor penentu kenaikan nilai Indeks Kearsipan di Tahun 2024.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis:



Pada grafik di atas dapat terlihat capaian kinerja nilai indeks pengelolaan arsip eksternal (LAKE) kembali mengalami kenaikan di tahun 2024, sempat turun di Tahun 2022 dengan perbandingan tahun 2021 namun nilai LAKE yang langsung dinilai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumbar naik pada tahun 2023 dan 2024 dengan realisasi sebesar 70,11%.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.1 Analisa Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target

Penyebab berhasilnya pencapaian target pada indikator Indeks Kearsipan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam hal peningkatan Indeks Kearsipan;
2. Adanya kolaborasi dari beberapa stakeholder untuk Indeks Kearsipan.

5.2 Analisa Penyebab Faktor Penghambat Indikator Kinerja

Beberapa faktor penghambat pencapaian indikator kinerja Indeks Kearsipan antara lain :

1. Keterbatasan anggaran urusan kearsipan;
2. Keterbatasan Tenaga Fungsional Kearsipan;
3. Masih kurangnya sarana prasarana kearsipan.

5. Upaya Peningkatan Pencapaian Target Kinerja

Berikut beberapa upaya dalam meningkatkan pencapaian target kinerja :

1. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola kearsipan di OPD maupun Nagari dan Kecamatan;
2. Melakukan rapat-rapat evaluasi internal dengan pimpinan maupun antar lintase sektor OPD untuk dapat menunjang program dan kegiatan kearsipan;
4. Melakukan pembinaan-pembinaan tata kelola kearsipan ke OPD dan Nagari.

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6

1.	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	70,11%	77,31%	(-7,2)%
----	---	-------------------------	--------	--------	---------

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar -7,2%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, untuk indikator kinerja Indeks Kearsipan (ANRI) dapat interpestasikan belum efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Indeks Kearsipan (ANRI) adalah sebesar Rp20.999.100. dengan persentase 77,31%. Dalam mencapai target indikator Indeks Kearsipan (ANRI) tahun 2024 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.27.163.160,- dengan 2 program 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

7. Capaian program/ kegiatan sasaran 4 dengan indikator Nilai Indeks Pengelola Arsip Eksternal (LAKE) adalah sebagai berikut:

No	Program / Sub Kegiatan	Capaian Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi	Capaian
	Program Pengelolaan Arsip	Outcome : Nilai Indeks Kearsipan Eksternal (LAKE)			
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Output : Jumlah Naskah Yang Digunakan dan Diciptakan	60.786 Berkas	92.861 Berkas	152,76
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Outcome : Nilai Indeks Kearsipan Eksternal (LAKE)			
	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemsunahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh)	Output : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki	20 Arsip	0 Arsip	0

		Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun			
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Output : Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	80 Arsip	154 Arsip	192

6. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



**Sasaran 3:**

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Ukuran keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja ditetapkan dengan indikator kinerja berupa:

Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan & Perpustakaan dari Inspektorat



Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansi nya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMD.

Setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mana juga diberikan penilaian dan peringkat atas Implementasi SAKIP yang diterapkan di masing-masing Perangkat Daerah.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	Nilai	76 (BB)	75,50 (BB)	99,34	Berhasil	

Dari tabel diatas dapat terlihat Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat pada tahun 2024 realisasinya 75,50 (BB) dengan target 76 (BB) persentase capaian 99,34% interpretasi Berhasil. Realisasi tahun 2024 tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan SDM dalam peningkatan kapasitas nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024		%	Interpretasi	Ket
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	Nilai	79,29 BB	76 (BB)	75,5 0 (BB)	99,3 4	Berhasil	

Realisasi kinerja pada indikator kinerja sasaran Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat pada tahun 2024 adalah BB dengan nilai 75,50 dengan interpretasi Berhasil. Di tahun 2023 Realisasi Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mendapatkan nilai 79,29 dengan predikat BB. Nilai tahun 2024 turun dibandingkan tahun 2023, penyebab penurunan nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah adanya keterbatasan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM dalam hal peningkatan nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:



Pada grafik di atas dapat tergambar realisasi hasil penilaian evaluasi SAKIP dari tahun 2021 s.d 2026. Hasil penilaian dari tahun 2021 sampai 2023 masih berada di atas target yang ditetapkan. Untuk tahun 2023 terjadi penurunan kinerja atas Penilaian Evaluasi SAKIP dimana realisasinya masih dibawah target.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.1 Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian Target

Penyebab gagalnya tercapai target pada indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
2. Belum adanya perhatian dan kerjasama yang serius dari masing-masing Bidang untuk menuntaskan target-target kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya;
3. Keterbatasan SDM Bidang Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melengkapi dan membuat dokumen-dokumen perencanaan maupun pelaporan.

5. Upaya Peningkatan Pencapaian Target Kinerja

Berikut beberapa upaya dalam meningkatkan pencapaian target kinerja :

1. Melakukan evaluasi kinerja berjenjang tingkat staf hingga pejabat eselon III atas pencapaian kinerja dan tugas pokok dan fungsi;

2. Melakukan pengusulan SDM melalui ANJAB ABK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
3. Melakukan prioritas penganggaran untuk pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	75,50%	94,71%	(-19,21)%

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar -19,21%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, untuk indikator kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat dapat interprestasikan tidak efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat adalah sebesar Rp3.188.745.527, dengan persentase 94,71%. Dalam mencapai target indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat tahun 2024 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.3.366.830.190,- dengan 1 program 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

A. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pendanaan merupakan faktor penting dalam rangka pencapaian kinerja suatu organisasi. Pada tahun 2024 total pagu belanja Dinas

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman diluar gaji dan tunjangan adalah sebesar Rp1.424.658.840.

Berikut realisasi belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	397.495.680	359.940.144	37.555.536	90,55
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.755.000	39.903.000	5.852.000	87,21
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.000.000	19.613.000	3.387.000	85,27
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.755.000	20.290.000	2.465.000	89,17
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85.785.000	85.760.000	25.000	99,97
a	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.835.000	80.820.000	15.000	99,98
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.950.000	4.940.000	10.000	99,80
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.931.840	54.087.210	12.844.630	80,81
a	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.931.840	54.087.210	12.844.630	80,81
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.023.840	180.189.934	18.833.906	90,54
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	29.379.934	18.620.066	61,21
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.023.840	150.810.000	213.840	99,86

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

II	Program Pengelolaan Arsip	9.589.160	9.468.500	120.660	98,74
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	9.589.160	9.468.500	120.660	98,74
a	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	9.589.160	9.468.500	120.660	98,74
III	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	17.574.000	11.530.600	6.043.400	65,61
1	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	10.214.000	4.251.600	5.962.400	41,63
a	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	10.214.000	4.251.600	5.962.400	41,63
2	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/Atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	7.360.000	7.279.000	81.000	98,90
a	Sub Kegiatan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	7.360.000	7.279.000	81.000	98,90
IV	Program Pembinaan Perpustakaan	967.224.447	882.376.509	84.847.938	91,23
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	770.190.247	695.004.092	75.186.155	90,24
a	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	25.845.000	24.482.600	1.362.400	94,73
b	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	471.585.247	406.714.392	64.870.855	86,24
c	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh	31.300.000	30.370.900	929.100	97,03

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				
d	Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	176.500.000	174.359.800	2.140.200	98,79
e	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	25.000.000	24.572.200	427.800	98,29
f	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	39.960.000	34.504.200	5.455.800	86,35
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	197.034.200	187.372.417	9.661.783	95,10
a	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	25.000.000	20.750.000	4.250.000	83,00
b	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	83.000.000	81.446.539	1.553.461	98,13
c	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	56.034.200	52.332.878	3.701.332	93,39
d	Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	33.000.000	32.843.000	157.000	99,52
V	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	32.775.553	18.086.600	14.688.753	55,18
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	32.775.553	18.086.600	14.688.753	55,18
a	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan, dan Pengalihmediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	32.775.553	18.086.600	14.688.753	55,18
	JUMLAH	1.424.658.840	1.281.402.353	143.256.287	89,94

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah instrument yang digunakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024 ini disusun berdasarkan misi ke 4 dan ke 5 pada Renstra periode 2021 s.d 2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sehingga capaian kinerja setiap tahunnya dapat menggambarkan capaian pada rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut beberapa keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2024:

1. Nilai LAKE tahun 2024 yang dikeluarkan oleh ANRI 70,11 dengan predikat BB;
2. Terlaksananya penerapan aplikasi persuratan SRIKANDI;
3. Terselenggaranya lomba Musikalisasi Puisi, lomba Bercerita, Pemilihan Duta Baca TK. Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat tingkat Kab. Padang Pariaman;
4. Terlaksananya layanan mobil perpustakaan keliling ke pustaka sekolah/Nagari/TBM maupun di lingkungan Pemerintah Kab. Padang Pariaman;
5. Terlaksananya layanan antar jemput pemustaka ke Perpustakaan Umum Daerah bagi Siswa SD/SMP dan SMA di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman;
6. Terlaksananya instalasi aplikasi Insisilite kepada perpustakaan Nagari dan Sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengunjung perpustakaan;

7. Terlaksananya pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan atau perpustakaan berbasis inklusi sosial;
8. Terlaksananya kegiatan pengadaan bahan bacaan pustakaan, Ac, dan Gorden untuk ruang layanan perpustakaan.;
9. Nilai IPLM Kabupaten Padang Pariaman 52,54 dengan kategori Sedang;
10. Meningkatnya nilai Tingkat Kegemaran Membaca 69,59 dengan kategori Sedang.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terhadap akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan;
2. Terlaksananya berbagai program dan kegiatan sesuai dengan output maupun outcome yang ditargetkan;
3. Adanya koordinasi dan konsultasi yang baik antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab/Kota di Sumatera Barat serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan jika dibandingkan dengan ANJAB dan ABK;
2. Kemampuan SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang masih terbatas dalam bidang teknologi informasi;
3. Masih rendahnya kepedulian pimpinan perangkat daerah terhadap pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerahnya masing-masing;
4. Terbatasnya anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyebabkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan urusan kearsipan dan perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
5. Masih rendahnya minat dan budaya membaca masyarakat;
6. Luasnya wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang menyebabkan pemerataan layanan perpustakaan sulit dilakukan.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan antara lain:

1. Melakukan usulan penambahan pegawai melalui BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman dan mendorong pegawai yang ada saat ini untuk mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis yang sifatnya meningkatkan kompetensi SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
2. Meningkatkan kegiatan promosi dan advokasi Perpustakaan kepada masyarakat dan stakeholder terkait;
3. Melakukan penguatan kerjasama dengan lintas OPD untuk peningkatan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Meningkatkan pelayanan kearsipan dan perpustakaan melalui implementasi program-program dan kegiatan unggulan yang terkait langsung dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tahun 2024.

Pariaman, 30 Januari 2025
**Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Padang Pariaman**

ERMAN, S. Sos. MM
NIP. 19651125 198602 1 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERMAN.S.Sos.MM

Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

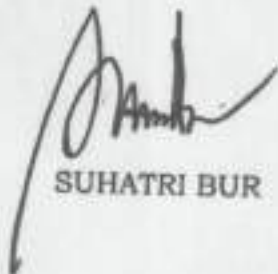
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pariaman, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,


SUHATRI BUR


ERMAN.S.Sos.MM

NIP. 19651125 198602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Sasaran/Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Jumlah Ekspansi Menyerok Layuran Ekspansi	100
		Melihat Tingkat Ketersediaan Membaca	67,30
2	Peningkatnya pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan	Jumlah Kearsipan (ANRI)	88
3	Peningkatnya Akurabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Pembacaan Evaluasi SARIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektur	76 (88)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pembinaan Perpustakaan	967.228.447	APBD
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Berekah Kurni	31.775.553	APBD
3. Program Peningkatnya Utusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.728.534.764	APBD
4. Program Pengelolaan Arsip	64.779.200	APBD
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40.214.000	APBD
JUMLAH	4.832.627.964	

BUPATI PADANG PARIAMAN



BUSIATRI BUR

Padang, 02 Januari 2024
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



ERMAN S. S. MM
NIP. 19651125 198002 1 001

REVISI BERJENJANG				
Ketua Tim	Ditulis		Waktu	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal
4/1-24	1	24-24	1	24-24

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapok	
Inspektur	
Kabag Organisasi	